

**PARTISPASI POLITIK PEREMPUAN DI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL
JAWA TIMUR SURABAYA**

Akbar Maulana Azis

08040254240 (PPKn, FIS, UNESA) akbarazis20@yahoo.co.id

Oksiana Jatiningih

0001106703 (PPKn, FIS, UNESA) oksianajatiningih@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk partisipasi politik perempuan dalam kegiatan politik yang ada di Dewan Pimpinan Wilayah partai Amanat Nasional Jawa Timur. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan subyek penelitian *Random sampling* (sampelacak). Lokasi penelitian berada di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur ini terletak di Jalan Darmo Kali no 18 Surabaya. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur. Hasil penelitian mendeskripsikan angka-angka perolehan perhitungan kuesioner yang meliputi tiga tahap, yaitu tahap perumusan, pengumpulan data, dan penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam suatu tahap perencanaan kegiatan atau program kerja tersebut berada pada kategori rendah. Rendahnya partisipasi politik perempuan pada tahap ini yaitu dikarenakan adanya perbedaan asumsi di Dewan Perwakilan Wilayah jika dilihat dari gender (jeniskelamin). Sebagian besar anggota yang berpartisipasi pada tahap perencanaan kegiatan tersebut adalah laki-laki. Hal tersebut disebabkan adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam Dewan Perwakilan Wilayah, yang membedakan kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Perempuan menganggap bahwa seorang laki-laki memiliki tanggung jawab, ke kewajiban dan hak yang lebih tinggi untuk turun langsung mengikuti rapat perencanaan

Kata kunci :Partisipasi politik perempuan, Dewan Pimpinan Wilayah PAN JATIM

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the form of political participation of women in political activities in the Regional Leadership Council of the National Mandate Party of East Java. The research method used is descriptive quantitative study subjects using random sampling (sampelacak). Research sites located within the Regional Leadership Council of the National Mandate Party, East Java is located at No. 18 Jalan Darmo Kali Surabaya. Regional Leadership Council of the National Mandate Party, East Java. The results of the study describing the calculation acquisition figures questionnaire which includes three phases, namely the formulation, collection of data, and data presentation. Based on the results of this study concluded that women's participation in an activity or program planning phase of the work is in the low category. The low political participation of women at this stage is due to differences in assumptions in the House of Representatives region when viewed from a gender (jeniskelamin). Most of the members who participated in the planning stages of these activities are boys. This is due to the existence of a system of social stratification that formed the Regional Representative Council, which distinguishes between the position and the degree of men and perempuan. Perempuan assume that a man has a responsibility, obligation and the right to a higher to down directly following the planning meeting.

Keywords: women's political participation, PAN Regional Leadership Council JATIM

PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan di Indonesia dimulai sejak Indonesia belum merdeka. Beberapa tokoh perempuan Indonesia seperti R. A. Kartini, R. Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien adalah bukti bahwa ada perempuan Indonesia yang berperan penting dalam sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Meskipun perempuan mempunyai prestasi yang bagus dalam perjalanan menuju dan setelah kemerdekaan Indonesia, masih banyak hambatan yang dialami oleh kaum perempuan untuk mendapat tempat untuk menunjukkan eksistensinya. Sebagian negara berkembang terdapat sejumlah kendala baik struktural maupun kultural dalam adanya partisipasi politik perempuan.

Kendala struktural sering kali berkaitan dengan permasalahan pendidikan, pekerjaan dan status sosial. Bidang pendidikan, kemampuan untuk berpolitik perempuan sangat sulit untuk bisa bersaing dengan laki-laki. Perempuan yang mempunyai kapabilitas politik sebagian cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran yang non partisan.

Pekerjaan perempuan sering diibaratkan pekerjaan kelas dua, tidak penting dan berperan sebagai pembantu pekerjaan laki-laki. Sebagian besar pekerjaan perempuan setelah berkeluarga adalah mengurus rumah tangga, merawat anak hingga membantu suami sebagai kepala keluarga. Sedangkan Kendala Kultural meliputi anggapan masyarakat bahwa perempuan mempunyai sifat memelihara, mengasahi dan menyayangi. Untuk itu, perempuan cocok memikul tanggung jawab terhadap semua pekerjaan domestik. Keadaan ini melahirkan beban kerja ganda bagi perempuan yang bekerja di luar rumah. Hal ini disebabkan tuntutan tradisi yang mengharuskan perempuan mengurus rumah tangga, sementara di sisi lain perempuan memiliki ekspektasi yang sama dengan laki-laki, misalnya bekerja mencari nafkah dan aktif di partai politik.

Dalam realitas politik di sebagian negara, khususnya di Indonesia terdapat persoalan dalam peran dan posisi gender laki-laki dan perempuan. Selama ini jika bicara dunia politik, yang terjadi adalah diskriminasi atau peminggiran politik terhadap perempuan. Konsep-konsep seperti kompetisi, partisipasi politik, kebebasan sipil dan politik dalam politik ternyata hanya terbatas padadunia laki-laki (dunia maskulin). Apabila perempuan terlibat di sana, mereka harus masuk dan berperilaku politik seperti laki-laki. Diskriminasi seperti ini lebih didasarkan pada apa yang disebut sebagai keyakinan gender, dan ini menjadi dasar ketidakadilan di berbagai tingkatan mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga lingkungan pemerintahan atau negara.

Representasi perempuan yang rendah dalam partisipasi politik di Indonesia, khususnya keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal. Masalahnya yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya pengambilan keputusan yang menyangkut dan berdampak pada perempuan. Idealnya semua komponen bangsa harus terlibat dalam merumuskan segala kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sangat tidak adil dan bahkan melanggar hak asasi manusia, jika perempuan masih didiskriminasikan dalam ekspektasi perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.

Demikian, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif sangat penting. Keterwakilan perempuan di legislatif akan memudahkan akses perempuan untuk mengawasi dan menyalurkan kebijakan-kebijakan yang belum dianggap adil bagi hak-hak perempuan. Duduknya perempuan dalam lembaga-lembaga tersebut, maka dapat terlibat langsung dalam proses kebijakan sebagai pembuat keputusan (decision maker).

Gerakan kesetaraan gender dianggap sebagai sebuah jawaban untuk mengatasi persoalan perempuan. Gerakan ini sudah berkembang menjadi gerakan massal yang sangat berpengaruh dan membawa perubahan pada sistem politik terutama sistem Pemilu. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009. Pada Pemilu 1999 sebanyak (9%), Pemilu 2004 sebanyak (11,8%), dan Pemilu 2009 sebanyak (18%). Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat di dalamnya, menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik. Bagi kaum perempuan di Indonesia, perubahan sistem politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata. Perubahan dalam sistem Pemilu antara lain, diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang berisi :

“Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” (Undang-Undang No.12 Tahun 2003). Dengan adanya kebijakan ini maka pemerintah memacu partai politik untuk memberikan kesempatan

kepada kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi politiknya, dan diharapkan partisipasi perempuan baik di parlemen khususnya maupun di lembaga-lembaga politik lain”.

Terkait dengan Undang-Undang tersebut, sejak tahun 2004, Indonesia telah menerapkan *affirmative action* dalam system pemilu, yakni dengan diterapkannya kuota mengenai pencalonan perempuan sebesar (minimal 30%). Begitu pula pada pemilu 2009, yang bahkan dibuat peraturan mengenai representasi perempuan di ranah legislative.

Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih tergolong rendah meskipun ada Undang-Undang no 12 tahun 2003, hal ini diutarakan oleh Khofifah Indra Parawangsa dalam seminar “*Keterwakilan Perempuan dalam Politik pada Pemilu 2004*” yang mengatakan bahwa,

representasi politik kaum perempuan di negeri ini masih rendah. Terbukti jumlah anggota parlemen hanya sekitar delapan persen, padahal jumlah pemilih perempuan pada pemilu 1999 lalu mencapai 57 persen. *Under-representation* seperti itu tidak hanya terjadi di parlemen, tetapi juga di lembaga eksekutif, yudikatif, dan partai-partai politik”.

Kuota 30 % yang diberikan pemangku kebijakan untuk mewujudkan partisipasi aktif dan keterwakilan perempuan dalam eksekutif maupun legislative kurang dapat terlaksana dengan baik yang ditandai dengan hanya 18 % yang dapat terserap dalam pemilu 2009. Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan ini tidak terlepas dari budaya politik masyarakat serta anggapan bahwa politik merupakan aktivitas bagi kaum laki-laki. Perempuan dianggap tidak cocok berada dalam ruang lingkup kekuasaan dan pemerintahan dikarenakan kodrat atau tradisi bahwa wanita tempatnya adalah sebagai ibu rumah tangga.

Kendala politik yang akan dihadapi oleh perempuan yang berada dalam wilayah publik menurut A.M Fatwa (2003:192) : 1) Kurangnya dukungan lembaga-lembaga politik formal, seperti partai, atau terbatasnya akses untuk jaringan politik, dan masih meratanya standar ganda; 2) Kurangnya hubungan dan kerja sama dengan organisasi publik lainnya, seperti Serikat Dagang dan kelompok-kelompok perempuan; 3) Tidak adanya sistem pelatihan dan pendidikan yang berkembang, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik, pada khususnya”.

Meskipun perjuangan untuk mendapat kuota 30 % bagi perempuan dianggap gagal akan tetapi keterwakilan perempuan mengalami peningkatan pada

pemilu 2004. Hal ini tidak menyurutkan nilai – nilai perjuangan aktivis perempuan, karena sarana strategis dalam meminimalisir bahkan menghapus ketidakadilan untuk mencapai titik kesetaraan gender melalui lembaga legislatif dan keterwakilan yang representatif dan profesional. Sehingga partisipasi perempuan secara optimal melalui anggota legislatif 2004 diharapkan : 1) Secara kolektif anggota legislatif perempuan mempunyai keberanian memperjuangkan hak – hak perempuan serta berjuang memberantas KKN 2) Anggota legislatif perempuan hendaknya dapat merubah image bahwa politik itu kotor sehingga perempuan tetap akan menjaga keseimbangan antara intelektualitas dan emosional dalam proses politis 3) Anggota legislatif perempuan diharapkan menjadi pelopor dalam memperjuangkan isu kerakyatan, perempuan dan anak yang selama ini kurang disentuh oleh para wakil rakyat. 4) Anggota legislatif perempuan dapat merubah image tentang gaya hidup, agar tidak menjadi jurang pemisah dengan rakyat yang diwakilinya. 5) Komunikasi aktif dengan rakyat yang diwakili, hendaknya menjadi sarana memahami permasalahan yang berkembang, 6) Anggota Legislatif perempuan harus kompak untuk sebuah perubahan yang signifikan bagi perubahan kaumnya.

Salah satu partai politik yang memperjuangkan kesetaraan dan keterwakilan perempuan di politik adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Amanat Nasional (PAN) diharapkan mampu memberikan perubahan serta perbaikan untuk bangsa ini juga diharapkan dapat membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Partai Amanat Nasional bukan merupakan partai politik yang berlandaskan atas agama tertentu, PAN merupakan partai politik yang terbuka bagi siapa saja yang ingin ikut aktif dalam berpolitik. Komitmen PAN dalam memberdayakan perempuan dalam politik serta meningkatkan partisipasi politik perempuan telah ditetapkan dalam Garis Perjuangan PAN disebut Pasal 8, bahwa PAN memperjuangkan: a) Persamaan hak perempuan mesti diwujudkan secara hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada perempuan untuk berkecimpung di segala lapangan kehidupan. b) PAN memperjuangkan keadilan gender, karena itu PAN memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di segala lapangan kehidupan.

Berdasarkan Garis Perjuangan PAN di atas, terlihat bahwa PAN berupaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh jajaran PAN baik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah. Partisipasi politik perempuan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Jawa Timur dianggap masih perlu untuk ditingkatkan. Salah satu konsep kunci

dalam Ilmu Politik untuk mengukur partisipasi perempuan dalam politik adalah keterwakilan politik. Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

Keterwakilan politik tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif sangat penting. Keterwakilan perempuan di legislatif akan memudahkan akses perempuan untuk mengawasi dan menyalurkan kebijakan-kebijakan yang belum dianggap adil bagi hak-hak perempuan. Duduknya perempuan dalam lembaga-lembaga tersebut, maka dapat terlibat langsung dalam proses kebijakan sebagai pembuat keputusan. Selain itu keterlibatan kader perempuan dalam kegiatan partai di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Jawa Timur terlihat pada perempuan sebagai tulang punggung keluarga, Perempuan PAN yang menggerakkan ibu-ibu PKK ke arah kepentingan bersama dengan memberikan penjelasan akan pentingnya menjadi pemilih dalam pemilu yang berlangsung lima tahun sekali guna melangsungkan kegiatan demokrasi dan kenegaraan, Perempuan PAN sebagai media pelatihan wirausaha bagi ibu-ibu serta perempuan PAN yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam memperjuangkan kaum wanita untuk dipilih oleh masyarakat pada saat dilaksanakannya pemilu.

Selain itu jumlah pengurus DPW Jawa Timur secara keseluruhan adalah 127 orang dan 48 perempuan diantaranya. Partisipasi politik perempuan dalam Partai Amanat Nasional setidaknya bisa mewakili 30% keterwakilan perempuan yang telah diatur oleh undang-undang, tetapi pada penerapannya keterwakilan perempuan yang duduk pada parlemen pemerintahan belum mencapai keterwakilan 30% maka dari itu untuk sukseskan pemerintah yang demokratis, terkait keterwakilan perempuan 30% partai amanat nasional mulai mengaturnya melalui tataran pengurus partai dengan memberikan porsi lebih kepada keterwakilan perempuan.

Merujuk pada kondisi saat ini, mayoritas parlemen di dunia masih didominasi oleh anggota laki-laki. Representasi perempuan di parlemen rata-rata masih rendah, belum mencapai 30%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aturan main atau regulasi atau norma, bangunan struktur, proses kerja maupun penilaian atas kinerja anggota parlemen masih ditentukan melalui ukuran-ukuran dan kriteria yang dibuat para aktor pembuat kebijakan yang sebagian besar terdiri atas laki-laki. Ketika kaum perempuan mulai ikut berpartisipasi di lembaga perwakilan ini, dengan representasi yang terus

meningkat, dirasakan bahwa aturan main, regulasi, bangunan struktur kelembagaan di parlemen, norma, proses kerja maupun penilaian atas kinerja dan produk yang dihasilkan belum bisa mengakomodasi kepentingan mereka dan bahkan cenderung bias serta diskriminatif.

Kesempatan dalam kiprah politik dan peran kepemimpinan bagi perempuan, penting untuk terus ditingkatkan tidak hanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, tetapi juga agar perempuan dapat membangun sistem dan etika politik yang semakin baik. Ini terkait dengan kapasitas perempuan sebagai pemilih, pemimpin partai politik, legislator atau pejabat pemerintah supaya semakin banyak kebijakan publik yang merefleksikan kekhawatiran dan perspektif perempuan serta diiringi derajat sensitifitas yang makin tinggi pada berbagai persoalan di Indonesia. Dengan demikian, partisipasi yang dilakukan perempuan tidak saja sebagai partisipasi pasif, juga sebaiknya partisipasi aktif sebagai penentu kebijakan di tempat yang bersangkutan berusaha, agar benar-benar perempuan keberadaannya dapat diperhitungkan.

Salah satu konsep kunci dalam Ilmu Politik untuk mengukur partisipasi dalam politik adalah keterwakilan politik. Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Keterwakilan politik tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Secara konseptual, keterwakilan politik berawal dari pemilihan umum. Artinya Pemilihan Umum yang merupakan proses seleksi pemimpin akan menumbuhkan rasa keterwakilan politik di kalangan masyarakat luas, sebab pemimpin yang muncul di pusat kekuasaan disaring/diseleksi oleh pemilih. Begitupula halnya jika Pemilu berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyeleksi kebijakan sesuai dengan garis besar kepentingan mereka.

Perempuan dan kepentingannya dalam partai politik sering kurang diperhatikan. Pandangan ini sebenarnya berangkat dari pemahaman atau budaya yang tidak peka terhadap keadilan relasi. Iklim partai politik yang cenderung mereduksi politik sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan tidak memiliki komitmen dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang membutuhkan komitmen tinggi, serta persoalan diskriminasi kekerasan terhadap perempuan. Sekalipun terdapat divisi pemberdayaan perempuan dalam partai politik, belum dipergunakan secara maksimal demi mengangkat perempuan ke panggung politik. Suara perempuan dalam partai politik pun mengalami hambatan karna jumlahnya yang rendah, hingga tersingkir

oleh mayoritas (laki-laki). Dengan demikian, perempuan turut mempunyai andil yang besar dalam partisipasi anggota legislative / politik.

Selain partisipasi anggota legislatif perempuan, segenap komponen masyarakat tetap akan berpartisipasi secara aktif melalui forum – forum atau organisasi yang ada dalam bentuk, bahkan beberapa kelompok perempuan yang mempunyai integritas tinggi, merasa lebih nyaman berpartisipasi dalam wadah organisasi non pemerintahan atau LSM dan tidak tertarik di partai politik. Para aktivis perempuan diluar anggota legislatif dapat berpartisipasi aktif melalui beberapa kegiatan, diantaranya : 1) Melakukan kontrol terhadap kinerja anggota dewan yang terhadap amanat rakyat, meskipun fungsi dewan juga kontroling, sebenarnya kontrol internal lebih efektif dan efisien karena tidak melibatkan unsur organisasi yang lain (Clutterbuck:2003,45), 2) Ikut serta dalam perencanaan anggaran pembangunan Daerah, 3) Sebagai pelaksana dalam peningkatan pemberdayaan warga masyarakat

Menurut kamus filsafat ideologi berasal dari bahasa Yunani : idea yang berarti ide, gagasan dan logos yang berarti studi tentang ..” idea juga diartikan dengan pemikiran, khayalan, konsep dan keyakinan, sedangkan logos berarti logika. Dalam perkembangannya, pengertian ideology semaki meluas meskipun sebenarnya mindpointnya tetap sama yakni idea atau gagasan. Secarahrifah dan sebagaimana yang digunakan dalam metafisika klasik, ideologi merupakan ilmu pengetahuan tentang ide - ide, studi tentang asal-usul ide- ide. Sementara dalam penggunaan modern, ideologi mengandung makna peyoratif (makna negatif atau jelek) sebagai teorisasi atau spekulasi dogmatik dan khayalan kosong yang tidak betul atau tidak realitas bahkan palsu dan menutup-nutupi realitas sesungguhnya.

Sedangkan dalam arti melioratif (makna positif atau baik), ideologi adalah setiap sistem gagasan yang mempelajari keyakinan - keyakinan dan hal - hal atau ide filosofis, ekonomis, politis dan sosial. Jadi, secara umum ideologi adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta.

Istilah *patriarkhi* sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Dalam kamus internasional kata ini disebut patriarches, dari asal kata patri (bangsa atau turunan) dan *archos* (pemimpin). Menurut kamus ini, patriarkhi selain berhubungan dengan kekuasaan atau pemimpin dalam suatu keturunan bangsa atau suku bangsa, juga dipakai untuk menyebut orang yang dianggap sebagai bapak dari suatu hasil usaha.

Istilah patriarkhi menjadi semakin luas pemakaiannya setelah dihubungkan tidak hanya dengan

konteks social, budaya dan politik, tetapi juga dengan penggambaran struktur masyarakat laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang dan berkeadilan. Istilah tersebut juga digunakan untuk menunjuk suatu kondisi ketika patriarkhi bertindak sebagai standar atas yang lain yakni perempuan. Jadi, secara lebih umum patriarkhi digunakan untuk menyebut kekuasaan laki-laki, cara laki-laki menguasai perempuan dan untuk menyebut perempuan etap dikuasai.

Pembangunan sistem politik yang demokratis dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung masyarakat. Karena hanya dengan partisipasi politik, maka hasil keputusan politik akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini, maka hasil keputusan politik akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan sistem politik adalah adanya partisipasi masyarakat.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Mubyarto (1984:35) bahwa partisipasi didefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Lebih lanjut menurut Adisasmita (2006:41) partisipasi adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Menurut Gatara (2009:207) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (Budiarjo,1990:71 dalam buku *Pengantar ilmu politik*)

Selanjutnya Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979:89), dalam buku *Partisipasi Masyarakat Madani*, membagi partisipasi dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 1) Tahap pengambilan keputusan, diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini adalah proses perencanaan suatu kegiatan. 2) Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini

dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek. 3) Tahap menikmati hasil, yang menjadi indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran. 4) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor kebiasaan partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P Huntington dan Joan Nelson (1993) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi : 1) Kegiatan pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses sebuah pemilihan umum, mencari dukungan bagi calon legislatif maupun eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. 2) Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu baik dari internal partai atau dengan eksternal partai. 3) Kegiatan organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinannya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang baik atau buruknya suatu pengambilan keputusan. 4) Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan, 5) Tindakan kekerasan (violence) – tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah huru hara, terror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya, tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau illegal. Sebab itu, penyusunan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk dalam kajian ini.

Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson relative lengkap. Hampir setiap fenomena bentuk partisipasi politik kontemporer dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi mereka. Namun, Huntington dan Nelson tidak memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita

politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk mengetahui permasalahan serta mendapatkan informasi dan data dari lokasi penelitian. Pada penelitian ini akan dijelaskan apa bentuk partisipasi politik Perempuan DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur

Tempat lokasi penelitian di DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur. Alasan memilih DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur dikarenakan Partai Amanat Nasional adalah Partai yang eksistensi perempuannya merupakan salah satu yang terbaik. Eksistensi perempuan di Partai Amanat Nasional ini dibuktikan dengan adanya PUAN Jatim yang bertugas menyerap aspirasi perempuan di Jawa Timur. Lokasi penelitian ini secara geografis DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur yang beralamat di Jl. Darmokali No. 18 Surabaya.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari data hasil pengisian angket (kuesioner) yang digunakan untuk mengetahui partisipasi politik perempuan, wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data awal atau gambaran umum mengenai partisipasi politik perempuan yang digunakan untuk mendapatkan data dokumentasi awal dan kejelasan mengenai bentuk partisipasi politiknya. Selain itu, data dari hasil wawancara juga digunakan sebagai data pendukung dari hasil data angket. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Dimana data sekunder ini diperoleh dari dokumentasi data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, seperti laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan dan foto.

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Sarwoto :2006). Adapun narasumber yang dijadikan sumber data informan dalam penelitian skripsi tentang keterlibatan perempuan dalam partai politik yakni :Seluruh pengurus perempuan di DPW PAN Jawa Timur sejumlah 48 orang,serta ada pula sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer diperoleh dari data hasil pengisian angket (kuesioner) yang digunakan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam partai politik di DPW Partai Amanat Nasional dalam pelaksanaan kegiatan, wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data awal atau gambaran umum mengenai partisipasi

perempuan ketika dalam pelaksanaan kegiatan dan observasi yang digunakan untuk mendapatkan data dokumentasi awal dan kejelasan mengenai wilayah yang mendapatkan dampak langsung atas kegiatan partisipasi perempuan khususnya yang dilakukan oleh perempuan partai amanat nasional. Selain itu, data dari hasil wawancara juga digunakan sebagai data pendukung dari hasil data angket.

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota atau kader perempuan yang berada di dalam kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur. Total keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 48 orang yang dapat diamati melalui karakteristik sebagai berikut :1). Jenis Kelamin, Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa seluruh responden yang memberikan keterangan jawaban kuesioner adalah berjenis kelamin perempuan berjumlah 48 Orang. Responden merupakan anggota Dewan Perwakilan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur. 2). Pendidikan, Tingkat pendidikan merupakan pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden selama hidupnya. Pendidikan ini juga dapat mempengaruhi partisipasi politik dalam sebuah program kerja DPW. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden dalam kepengurusan PUAN atau Kader perempuan DPW adalah SMA dengan prosentase sebesar 8,96%. Tingkat pendidikan S1 mencapai 11,2%, untuk tingkat pendidikan S2 mencapai nilai prosentase sebesar 8,4%, untuk S3 mencapai 5,6% dan untuk kader yang telah menjadi profesional mencapai prosentase sebesar 2,8%.

Litwin dalam Sutami (2009) mengatakan bahwa salah satu karakteristik partisipasi dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya tentu mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh maka seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi. 3). Usia, Hasil kuesioner penulis yang mengkategorikan usia responden menjadi lima bagian yaitu ≥ 20 tahun, antara 21-30 tahun, antara 31-40 tahun, antara 41-50 tahun dan ≤ 50 tahun.

Pengambilan fokus penelitian memiliki tujuan untuk melengkapi dan mengkhususkan data Skripsi ini. Variabel kualitatif dapat membatasi studi yang berarti dengan adanya focus (Moleong : 2000), penentuan focus

penelitian dan tempat penelitian menjadi lebih layak dan penempatan focus tersebut berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-inklusi dalam menjangkau informasi yang masuk dan keluar. Guna membatasi studi yang berkaitan dengan penelitian, maka focus penelitian ini adalah : 1) Bentuk partisipasi nyata : rapat harian, pemutusan kebijakan dan sumbangsih pemikiran guna kemajuan partisipasi perempuan dalam DPW PAN Jawa Timur. 2) Bentuk partisipasi tidak nyata : memberikan pendanaan dalam kegiatan masyarakat khususnya ibu-ibu.

Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain. Menurut Sugiyono (2009) dinamakan variabel karena memiliki variasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini yang menjadi variabel penelitian yaitu partisipasi politik perempuan.

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan makna variabel yang akan diteliti. Menurut Masri S (2003), memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan demikian definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah bentuk partisipasi politik perempuan yang merupakan ukuran mengenai keterlibatan atau keikutsertaan perempuan dalam sebuah kegiatan/program politik yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan bahkan sampai tahap pengawasan.

Indikator atau tolok ukur variabel dalam penelitian ini menggunakan skala klasifikasi :

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penyebaran angket (kuesioner) dan wawancara. Kuesioner (angket) yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup digunakan untuk mengetahui sikap atau tingkat partisipasi masyarakat dengan menjawab alternatif jawaban yang telah disediakan. Skala yang digunakan dalam angket tertutup ini termasuk skala Likert yang merupakan metode penskalaan pernyataan sikap dengan menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Pada umumnya pada nilai pada skala Likert terdapat 4 (empat) tingkatan. Berikut derajat penilaian skala angka yang digunakan :

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkatan partisipasi politik perempuan di DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis

deskriptif kuantitatif yang antara lain sebagai berikut: Suyanto dan Sutinah (2010) menyatakan bahwa analisis kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan dalam berbagai kategori.

Analisis kuantitatif disebut juga analisis statistic, yang mana penggunaan model ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu pengolahan data, pengorganisasian data, data penemuan hasil. Berdasarkan analisis kuantitatif maka teknik analisis data dijabarkan sebagai berikut : Pengolahan data meliputi kegiatan: 1) Editing, Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui daftar pertanyaan (kuesioner) perlu dibaca kembali untuk meneliti lengkap tidaknya pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, dan kejelasan makna jawaban, Jadi *editing* bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data. 2) Coding, Tahap selanjutnya dilakukan dengan proses *coding*. *Coding* adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama.

Setelah tahap *editing* selesai, maka hasil kuesioner diklasifikasikan menurut jenisnya. Hasil dari proses *coding* dimasukkan ke dalam table frekuensi untuk memperjelas dalam melihat kategori atau klasifikasi data. 3) Pemberian skor atau nilai, Dalam pemberian skor digunakan skala Likert yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Hasil dari proses *coding* dimasukkan kedalam tabel frekuensi untuk memperjelas dalam melihat kategori atau klasifikasi data. Klasifikasi data hasil kuesioner didasarkan pada 4 (empat) kategori yaitu : Nilai 1 (satu) untuk jawaban Tidak Pernah, Nilai 2 (dua) untuk jawaban Jarang, Nilai 3 (tiga) untuk jawaban Sering, Nilai 4 (empat) untuk jawaban Sangat Sering

Penentuan nilai pada setiap item jawaban disertai alasan sebagai berikut nilai 1 pada jawaban ‘Tidak Pernah’ karena jawaban tersebut merupakan jawaban terendah yang diberikan oleh responden dengan penafsiran bahwa responden tidak berpartisipasi sama sekali dan nilai 4 pada jawaban ‘Sangat Sering’ karena jawaban tersebut merupakan jawaban tertinggi yang diberikan responden dengan penafsiran bahwa responden sangat sering berpartisipasi dalam politik di DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur.

Pengorganisasian data dilakukan terhadap data-data yang telah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, yaitu : Menghitung jumlah skor item kuesioner. Hasil kuesioner yang sudah dimasukkan kedalam tabel frekuensi sesuai dengan 4 (empat) kategori yang telah ditentukan kemudian dihitung pada masing-masing kategori. Perhitungan hasil kuesioner berdasarkan pada kelompok responden menggunakan rumus sebagai berikut (dalam Riduwan, 2010) :

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = prosentase jumlah responden

F = jumlah jawaban responden

N = jumlah responden

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kantor Dewan Perwakilan Wilayah partai amanat nasional jawa timur ini terletak di jalan Darmo Kali no 18 Surabaya. Dewan perwakilan wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur ini memiliki sejarah latar belakang yang panjang terkait penempatan kantornya. Alasan utama berada di Surabaya karena kota Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur serta merupakan pusat dari seluruh kegiatan pemerintahan Jawa Timur.

Pada tahun 1990-an didirikan sebuah kantor yang memiliki luas sekitar 1 hektar di pinggir sungai darmo kali. Dibangun satu buah kantor induk yang berisikan ruangan-ruangan untuk struktural DPW PAN dan organisasi kepemudaan serta masyarakat dibawah naungan Partai Amanat Nasional. Selain itu di bangun pula sebuah gedung serbaguna yang umumnya dipergunakan untuk kegiatan DPW. Mulai dari kegiatan sosial hingga keolahragaan sebagai bentuk wujud partai menampung aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, dibangun satu bangunan khusus untuk para kader perempuan PAN dalam upaya penyeteraan gender. Bangunan tersebut dibangun atas keinginan ketua umum DPW PAN Jatim sebagai partai pelopor yang tidak melihat dari gender.

Mulai awal dibangun hingga sekarang, kantor DPW telah melakukan 4 kali pemugaran atau merenovasi kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan para kader dan kemajuan jaman. Antara lain, merenovasi gedung serba guna yang diperluas dan gedung untuk PUAN atau kader perempuan yang direnovasi sesuai penambahan kader perempuan didalamnya. Pada tahun 2000an dibangun satu gedung lagi untuk berkumpulnya organ sayap PAN seperti BM PAN, GMN, dan Aisyah.

Keanggotaan

Keanggotaan DPW PAN Jatim telah diatur oleh DPP PAN yang terbagi dalam struktural DPW yang berisikan Ketua Umum, Sekjen, Bendum, dan Bidang-bidang. Dari awal pembentukan DPW PAN Jatim telah ada pergantian pengurus sebanyak 6 kali periode. Ketua umum pernah menjabat oleh kang Yoto yang beliau sekarang merupakan Bupati dari Kabupaten Bojonegoro.

Kader DPW merupakan hasil rekomendasi dari setiap organ sayap partai. Sehingga kader-kader yang berada didalam DPW merupakan kader yang mumpuni di bidangnya. Proses perekrutan anggota ini, tidak hanya dilakukan di DPW Jatim saja namun dilakukan di DPW PAN daerah mana saja seluruh Indonesia.

Untuk kader perempuan, DPW telah menyediakan tempat khusus dan memiliki wadah untuk menampungnya yakni PUAN Jatim. Organ ini dikhususkan untuk para kader perempuan yang berkompeten dalam dunia politik. Selain itu, tidak hanya sebagai penggerak partai saja namun sesekali kader dari PUAN ini ikut berpartisipasi dengan mengirimkan kadernya untuk ikut bertarung dalam pemilihan legislatif.

Masa keanggotaan di DPW ini berlaku jangka waktu 5 tahun di setia periodenya. Setelah masa jabatan habis, setiap kader berkesempatan untuk memperoleh jenjang yang lebih tinggi yakni berproses ditingkatkan DPP PAN.

Program DPW PAN Jatim

Salah satu cara efektif yang lazim digunakan oleh setiap partai politik untuk membangun basis masa dalam rangka memperbesar konstituennya adalah mengorganisasikan rakyat melalui stratifikasi sosialnya, misalnya kelompok pemuda, mahasiswa, pelajar, buruh, perempuan, petani, nelayan, kaum professional, tukang becak, dan lain-lain. Struktur yang telah dispesialisasikan ini selain menjadi media efektif bagi partai untuk melakukan komunikasi dengan rakyat juga akan menjadi kekuatan partai sebagai landasan legitimasi dan eksistensi partai di mata publik. Langkah-langkah tersebut dapat diperjelas melalui tabel berikut ini :

Tabel 11
Langkah-Langkah pelaksanaan kegiatan DPW PAN Jatim

TAHAPAN PELAKSANAAN	TUJUAN
Sosialisasi awal tentang DPW PAN	a. mendapatkan gambaran dinamika sosial masyarakat
	b. penyebarluasan informasi tentang akan adanya DPW PAN
	c. menjaring aspirasi masyarakat sekitar
	d. mengumumkan penerimaan relawan

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)	a. membangun komitmen masyarakat untuk menerima/menolak program yang dibuat oleh DPW
	b. mendapatkan relawan yang sesuai kriteria
	c. menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi & mengawal program DPW
Pemetaan Swadaya (PS)	a. menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi pemetaan swadaya
	b. menghasilkan relawan yang mampu menganalisis masalah dan potensi masyarakat
	c. membangun realita kesadaran persoalan dan potensi masyarakat
	d. membangun motivasi untuk menyelesaikan persoalan
Pembentukan LKM	a. menghasilkan relawan yang mampu memfasilitasi dan melaksanakan kelembagaan
	b. menghasilkan relawan yang mampu menganalisis tata kelembagaan setempat
	c. masyarakat memahami kriteria kelembagaan yang dapat berperan sebagai LKM
	d. masyarakat menyadari kebutuhan lembaga yang dipimpin oleh orang-orang yang menerapkan nilai universal kemanusiaan
	e. masyarakat mampu merumuskan kriterian pemimpin masyarakat
	f. membentuk panitia pendirian LKM
	g. menghasilkan panitia yang mampu melaksanakan pembentukan LKM
	h. penyusunan draft AD/ART
	i. kesepakatan aturan main pembentukan LKM & kriteria usulan LKM
	j. memilih utusan dari setiap wilayah sebagai pengawal keputusan
	k. membangun lembaga kepemimpinan masyarakat yang diisi oleh orang-orang baik, murni, dan benar

Sumber : Pedoman AD/ART Partai Amanat

Nasional

Hasil Penelitian

Partisipasi Politik Perempuan di DPW PAN Jatim

Partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok perempuan dalam suatu kegiatan secara sadar. Jnabrabota Bhattacharyya (dalam Ndraha, 1990) mengartikan bahwa partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama kegagalan dalam mencapai hasil dari program kerja tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi politik perempuan. Sejalan dengan pendapat

Jnabrabota Bhattacharyya (dalam Ndraha, 1990), Adisasmita (2006) juga mengemukakan bahwa:

“partisipasi anggota masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/prpyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat local”.

Pernyataan keduanya mengartikan bawasannya partisipasi diperlukan dalam sebuah kegiatan guna meminimalisir kegagalan untuk mencapai tujuan. Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu ukuran mengenai keikutsertaan perempuan dalam sebuah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk-bentuk partisipasi. Variabel tersebut diturunkan ke dalam 5 sub-variabel yaitu pemilihan, lobby, organisasi, contracting, violence dan motivasi. Ketiga sub variabel tersebut kemudian diturunkan lagi kedalam indikator yang dijabarkan menjadi 20 pertanyaan dalam suatu kuesioner. Kuesioner tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi partisipasi perempuan dalam sebuah kegiatan pada program kerja DPW PAN Jatim dengan cara membagikan kuesioner kepada seluruh kader perempuan yang berada di DPW PAN Jatim.

Pemilihan

Kegiatan pemilihan mencakup pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Masing-masing indikator tersebut akan disajikan dalam masing-masing tabel frekuensi berikut:

Tabel 12
Tanggapan Responden
Terhadap Sub Variabel Pemilihan

No. Item	Indikator	Kategori skor jawaban				Total seluruh skor jawaban
		4	3	2	1	
		A	B	C	D	
1.	Partispasi pemilihan ketua	4	21	22	1	124
2.	Pencarian tim sukses	5	12	26	5	101

3.	Permintaan Permohonan dukungan	12	24	8	4	140
4.	Hambatan dalam pencalonan	10	31	6	1	146
5.	Dukungan keluarga	10	29	4	5	140
	Jumlah					651

Sumber: data primer, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari 48 responden terkait dengan bentuk partisipasi pemilihan dari beberapa indikator menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden mempunyai total skor 651 yang menurut tabel nomer 3 pemilihan tingkat partisipasinya sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi politik berbentuk pemilihan anggota perempuan mempunyai tingkat partisipasi politik sedang. Tingkat Partisipasi sedang ini menurut pernyataan Siti Rafika H adalah dikarenakan calon yang mengajukan diri merupakan calon yang layak dipilih. Seperti pernyataannya sebagai berikut :

“Dalam pemilihan atau pencalonan biasanya dari anggota perempuan itu lebih solid mas akbar, dikarenakan siapapun yang jadi diantara kami anggota perempuan merupakan seorang yang layak dipilih dan mampu mewakili aspirasi kita anggota perempuan”(sumber wawancara dengan siti rafika pada tanggal 7 April 2014)

Lobby

Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Lobby dapat berjalan apabila ada interaksi antara dua orang atau lebih sehingga dapat menghasilkan keputusan atau membatalkan keputusan. Masing-masing indikator tersebut akan disajikan dalam masing-masing tabel frekuensi berikut:

Tabel 13
Tanggapan Responden
Terhadap Sub Variabel Lobby

No. Item	Indikator	Kategori skor jawaban				Total seluruh skor jawaban
		4	3	2	1	
		A	B	C	D	
		F	F	F	F	
1.	Kemandirian dalam suksesi politik	3	14	10	21	95
2.	Pengambilan keputusan	7	16	3	22	104
3.	Kemandirian dalam pengambilan keputusan	2	34	8	4	130
4.	Hambatan dalam pengambilan keputusan	40	6	2	0	182
	Jumlah					511

Sumber: data primer, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari 48 responden terkait dengan bentuk partisipasi Lobby dari beberapa indikator menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden mempunyai total skor 511 yang menurut tabel nomer 4 tentang lobby tingkat partisipasinya sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi politik berbentuk lobby tentang mempengaruhi atau mengambil keputusan tingkatnya sedang. Partisipasi sedang ini menurut pernyataan Hadijah Aljufri salah satunya adalah dikarenakan perempuan tidak mempunyai daya tawar yang berlebih. Seperti pernyataannya sebagai berikut :

Kelemahan anggota perempuan mas Akbar dalam lobby selalu dinomerduakan dikarenakan kita tidak punya bargaining yang bisa menarik perhatian stakeholder partai. Kalaupun kita punya itu dikarenakan suara anggota perempuan sangat solid dan gak pecah. (sumber wawancara dengan Ibu Hadijah Aljufri, 7 April 2014)

Organisasi

Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Masing-masing indikator tersebut akan disajikan dalam masing-masing tabel frekuensi berikut:

Tabel 14
Tanggapan Responden
Terhadap Sub Variabel Organisasi

No. Item	Indikator	Kategori skor jawaban				Total seluruh skor jawaban
		4	3	2	1	
		A	B	C	D	
		F	F	F	F	
1.	Partisipasi kegiatan kepartaian	38	6	4	0	178
2.	Dampak pada partai	13	28	5	2	148
3.	Kewajiban anggota	20	9	11	8	137
4.	Penunjukan sebagai pelaksana kegiatan	6	9	31	2	115
	Jumlah					578

Sumber: data rekap penilaian responden, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari 48 responden terkait dengan bentuk partisipasi Organisasi dari beberapa indikator menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden mempunyai total skor 578 yang menurut tabel nomer 5 tentang organisasi tingkat partisipasinya sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi politik berbentuk kegiatan organisasi sedang. Seperti pernyataan Siti Rafika Hardhiansari :

Kegiatan organisasi terkadang banyak yang dadakan mas akbar sehingga terkadang kita anggotaperempuan jarang untuk ikut. Dikarenakan kesibukan kami mengurus anak dan suami yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kegiatan yang tak berhalangan dan disaat tugas rumah bebas

yang biasanya kami ikuti. (Sumber wawancara dengan Siti Rafika 7 April 2014)

Contacting

Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Masing-masing indikator tersebut akan disajikan dalam masing-masing tabel frekuensi berikut:

Tabel 15
Tanggapan Responden
Terhadap Sub Variabel Contacting

No. Item	Indikator	Kategori skor jawaban				Total seluruh skor jawaban
		4	3	2	1	
		A	B	C	D	
		F	F	F	F	
1.	Strategi pengembangan jaringan	1	7	1	39	66
2.	Permintaan bantuan dari anggota lain	16	11	13	8	131
3.	Pembangunan Jaringan	1	7	1	39	66
Jumlah						263

Sumber: data rekap penilaian responden, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari 48 responden terkait dengan bentuk partisipasi contacting dari beberapa indikator menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden mempunyai total skor 263 yang menurut tabel nomor 6 tentang contacting tingkat partisipasinya rendah.

Violence

Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*),

revolusi dan pemberontakan.. Masing-masing indikator tersebut akan disajikan dalam masing-masing tabel frekuensi berikut:

Tabel 16
Tanggapan Responden
Terhadap Sub Variabel Violence

No. Item	Indikator	Kategori skor jawaban				Total seluruh skor jawaban
		4	3	2	1	
		A	B	C	D	
		F	F	F	F	
1.	Ancaman	14	8	9	17	115
2.	Ketegasan keputusan dalam pertentangan	40	5	3	0	181
3.	Pembunuhan karakter politik	30	8	5	5	159
4.	Ancaman demonstrasi	22	4	0	22	122
Jumlah						577

Sumber: data rekap penilaian responden, 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari 48 responden terkait dengan bentuk partisipasi Lobby dari beberapa indikator menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden mempunyai total skor 577 yang menurut tabel nomor 16 tentang violence tingkat partisipasinya sedang.

Tabel 17
Bentuk Partisipasi Politik Perempuan di DPW PAN Jawa Timur

No	Bentuk Kegiatan	Skor	Kategori
1	Pemilihan	651	Sedang
2	Lobby	511	Sedang
3	Organisasi	578	Sedang
4	Contacting	263	Rendah
5	Violence	577	Sedang
Jumlah		2580	Rendah

Partisipasi politik anggota perempuan berbeda-beda bentuk partisipasinya. Hal ini disebabkan factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anggota berjenis kelamin perempuan di DPW Partai Amanat Sosial wilayah Jawa Timur. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua PUAN Jawa Timur :

Factor – factor yang mempengaruhi perempuan pada umumnya mas di DPW ini ada yang berasal dari eksternal dan internal. Dari eksternal dapat kita lihat ya kultur masyarakat dari kita sangat berbeda-beda, beda daerah ya beda lagi budayanya. Kemudian dari internal ya, kemauan kita sendiri apakah ingin ikut berpartisipasi secara ajeg atukah hanya ikut-ikutan. Contohnya ketika suami ikut nyemplung di parpol, istri juga tertarik untuk ikut gitu mas Akbar. (Hasil Wawancara dengan Siti Rafika H pada 20 Maret 2014)

Kalimat pernyataan tersebut didukung dengan salah satu pernyataan pendapat yang dipaparkan oleh salah satu anggota DPW PUAN Jatim yang menyatakan sebagai berikut :

“kalo pada tahap perencanaan kegiatannya, kami sudah sering dikasih undangan oleh pengurus agar bisa mengikuti dan menyumbangkan pikirannya, Mas. Tapi kenyataannya ya gitu, sebagian besar yang datang itu ya laki-laki thok. Itu pun nggak semua kader bisa datang. Katanya ada yang masih repot, ada yang masih kerja. Jadi ya yang datang sudah bisa ditebak, Cuma orang itu-itu aja” (hasil wawancara dengan Mbak Hariri Septianti, pada tanggal 20 Maret 2014).

Hambatan partisipasi politik anggota perempuan di DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur

Perempuan merupakan salah satu aktor dalam dunia politik, namun seringkali perempuan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dikarenakan berbagai kendala. Kendala yang dihadapi perempuan umumnya berasal dari

perempuan itu sendiri meskipun ada juga dari eksternal. Misalnya saja dalam pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif, seorang calon legislatif membutuhkan tiga modal utama yakni modal politik, modal social, dan modal ekonomi. Argumen yang terbangun adalah semain seorang calon mampu untuk mengakumulasi ketiga modal tersebut, maka calon tersebut semakin berpeluang untuk terpilih (marijan,2006). Bagi seorang caleg, ketiga modal ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Tak terkecuali bagi seorang caleg perempuan.

Pertama, modal politik. Modal politik mengacu pada adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi rakyat. Dengan kurangnya modal politik yang dimiliki oleh perempuan, maka akan memunculkan kendala sebagai berikut : pertama, kelaziman model maskulin mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan. Laki-laki mendominasi area politik, dimana laki-laki memformulasi aturan-aturan permainan poliik, dan laki-laki mendefinisikan standar evaluasi.

Seperti yang dijelaskan oleh Siti Rafika Hardhiansari :

“Sebenarnya perempuan, khususnya anggota perempuan di DPW PAN Jatim memiliki cukup modal untuk berpartisipasi dalam politik. Tetapi dikarenakan ada stigma yang berkembang bahwa area politik sedikit banyak merujuk pada laki-laki. Sehingga ketika ada kesalahan dalam prosesnya kita anggota perempuan selalu dibandingkan dengan laki-laki padahal kesalahan itu juga pernah dilakukan oleh anggota laki-laki. (sumber wawancara dengan Siti Rafika H tanggal 7 April 2014)

Kedua, Kurangnya dukungan partai. Misalnya, terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan, terbatasnya akses untuk jaringan politik, dan meratanya standar ganda. Terkait dengan hal tersebut, meskipun partai-partai politik memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan kampanye, tetapi perempuan tidak memperoleh keuntungan dari sumber yang ada tersebut. Sebagai contoh, partai-partai tidak memberikan dukungan dana yang memadai untuk kandidat perempuan. Selain itu, proses seleksi dan nominasi dalam partai-partai politik sering menjadi kriteria dalam menyeleksi kandidat. Dengan budaya kepartaian yang seperti ini, maka kandidat perempuan tidak mampu berkembang seperti halnya kandidat laki-laki (Karam,1999). Hal ini seperti diungkapkan Siti Rafika H :

“Kecenderungan dalam proses seleksi atau biasanya disebut fit and proper test yang dijadikan tolak ukur adalah standar dari

laki-laki, meskipun kita terkadang senang karena ada kesetaraan. Tetapi, alangkah baiknya dalam hal tertentu ada dispensasi. (sumber: wawancara dengan Siti Rafika H tanggal 7 April 2014)

Ketiga, kurangnya hubungan dan kerja sama dengan organisasi public lainnya, seperti serikat dagang (buruh) dan kelompok-kelompok perempuan. Para serikat buruh dan kelompok-kelompok perempuan di Indonesia, masih menjaga jarak dengan anggota parlemen, atau tidak memperkuat hubungan-hubungan yang terorganisir dalam bentuk komunikasi dan lobi mengenai berbagai isu yang terkait untuk meningkatkan perempuan pada tingkat pembuatan keputusan.

Selanjutnya modal sosial, modal sosial adalah yang berkaitan dengan bangunan relasi-relasi dan kepercayaan yang dimiliki oleh caleg dengan masyarakat yang dimilikinya. Terkait dengan adanya ketentuan mayoritas suara terbanyak, maka caleg perempuan dituntut untuk memiliki popularitas di dapilnya.

Ketiga, modal ekonomi. Secara jelas, modal ekonomi mengacu pada dana yang harus dimiliki dan/ atau dikeluarkan oleh seorang caleg untuk biaya kampanye. Menurut Ray Rangkuti, direktur Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA), biaya atau dana minimal untuk kampanye, adalah sebesar Rp. 1-6 miliar (Sutrisno, 2013). Rata-rata caleg perempuan tidak memiliki budget yang cukup untuk biaya kampanye. Lain halnya dengan caleg laki-laki, yang memiliki keberanian untuk perang dalam kampanye. Para caleg laki-laki umumnya lebih dipercaya, karena dianggap lebih berpengalaman sehingga memiliki potensi lebih besar untuk menang. Atas pertimbangan inilah, para caleg laki-laki lebih berpeluang untuk mendapatkan sponsor dana dari berbagai sumber. Lain halnya dengan caleg perempuan, yang dianggap sebagai pendatang baru dunia politik.

Selain persoalan ketidakmampuan perempuan dalam kepemilikan ketiga modal tersebut, caleg perempuan juga memiliki kendala ideologis dan psikologis (Karam, 1999). Adapun kendala ideologis dan psikologis yang akan dihadapi ketika akan masuk parlemen, adalah pertama, masih adanya ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki. System nilai patriarki, kaku, dan tradisional menampilkan peran-peran yang tersegregasi secara seksual, dan ini disebut sebagai nilai cultural tradisional.

Kedua, kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri. Suatu budaya ketakutan (*culture of fear*) mencegah perempuan berkompetisi dalam pemilihan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Ketiga, persepsi perempuan tentang politik sebagai suatu permainan kotor. Di beberapa negara, perempuan menganggap bahwa politik sebagai suatu permainan kotor. Ini telah memukul rasa percaya diri perempuan atas kemampuannya untuk berhadapan dengan proses politik. Kenyataannya, persepsi seperti ini merupakan hal umum di seluruh dunia. Persepsi ini merefleksikan realitas di berbagai negara dengan alasan berbeda-beda, namun ada beberapa kecenderungan umum bahwa perempuan melihat politik sebagai permainan yang kotor (Karam, 1999).

Persepsi bahwa politik itu kotor selalu dikaitkan dengan korelasi antara korupsi dengan pejabat publik. Misalnya, pada saat kampanye, seorang caleg membutuhkan dana yang besar. Dengan demikian, ketika dia menjabat, dia akan melakukan korupsi sebagai pengganti uangnya yang hilang. Hal ini juga terkait dengan kasus-kasus penyuapan dan pemerasan oleh para pejabat (Karam, 1999). Terakhir, kehidupan perempuan yang digambarkan dalam media massa. Media massa, termasuk publikasi-publikasi perempuan, tidak secara memadai menginformasikan hak dan peran perempuan dalam masyarakat, serta tidak juga mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki posisi perempuan.

Perempuan juga sering kali bermasalah dalam hal pengembangan jaringan dikarenakan sebagian perempuan kurang dapat menguasai perihal lobby. Sehingga, laki-laki lah yang menjadi penentu apakah lobby itu berhasil atau tidak dan secara otomatis jaringan akan dimiliki oleh kader anggota laki-laki. Hal ini juga dipengaruhi kondisi psikologis perempuan diantaranya seperti kesulitan untuk menghilangkan perasaan malu, tidak percaya diri dan merasa rendah diri.

3). Motivasi partisipasi politik anggota perempuan di DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur

Motivasi adalah adanya dorongan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Dorongan dapat tumbuh dari dalam diri maupun dari luar diri. Dorongan dari dalam diri tersebut dapat terwujud diimbangi dengan adanya motif pada diri seseorang, motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif, yang berguna untuk memberikan arah dalam bertingkah laku.

Bila dikaitkan dengan politik, yang dimaksudkan motivasi politik adalah hal yang mencakup alasan atau tujuan dari suatu perbuatan yang ingin dilakukan. Motivasi politik artinya suatu hal yang menjadi dorongan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kearah politik.

PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur

Partisipasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur ini kurang mendapatkan perhatian yang lebih oleh para pengurus DPW PAN Jaim secara keseluruhan secara keseluruhan sehingga akan berakibat mengganggu jalannya program kerja dari DPW itu sendiri. Keikutsertaan perempuan dalam program DPW PAN Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran perempuan bahwa keberadaan mereka dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja khususnya untuk permasalahan perempuan. Selain dapat mengganggu kinerja DPW, keterlibatan langsung perempuan dalam segala kegiatan DPW akan menghapus pandangan negatif masyarakat terkait kinerja perempuan dalam sebuah partai yang memandang kader perempuan atau anggota perempuan dalam sebuah partai hanya digunakan sebagai pelengkap atau pemenuhan kuota keterwakilan yang diatur dalam undang-undang pemilu oleh DPR.

Pemilihan

Kegiatan pemilihan mencakup pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.

Sub Variabel pemilihan memiliki beberapa indikator antara lain partisipasi pemilihan ketua dan pencarian tim sukses dimana paling banyak responden jarang berpartisipasi dalam hal ini. Selanjutnya permintaan permohonan dukungan, hambatan keluarga dan dukungan keluarga sebagian besar berpartisipasi baik. Sebagian responden mengeluhkan adanya hambatan ketika salah seorang kader perempuan berpartisipasi dalam pencalonan entah itu hambatan internal maupun eksternal.

Hasil menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pada indikator pemilihan adalah sedang. Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan perempuan mempunyai andil yang sedikit dikarenakan ketokohnya kurang kuat misalnya dalam pencalonan selain faktor eksternal yaitu keluarga dan lain-lain, ketooahan anggota perempuan kurang kuat dan dapat diterima oleh anggota lain dibanding anggota laki-laki. Masalah mobilitas dan militansi yang dimiliki perempuan masih perlu ditingkatkan lagi.

Lobby

Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Lobby dapat berjalan apabila ada interaksi antara dua orang atau lebih sehingga dapat menghasilkan keputusan atau membatalkan keputusan.

Hasil dari responden menunjukkan bahwa partisipasi anggota perempuan dalam variable lobby tingkat partisipasinya sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu ditingkatkan lagi peranannya perempuan dalam hal lobby. Menurut hasil responden skor tertinggi berada pada indikator hambatan dalam pengambilan keputusan, hal ini dikarenakan dalam proses lobby pelaku diharapkan responsif dan tanggap. Sebagian besar anggota perempuan DPW PAN Jatim masih ragu-ragu dalam pengambilan keputusan dan selalu meminta pertimbangan terlebih dahulu. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan dalam suatu hal yang membutuhkan keputusan yang cepat.

Organisasi

Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Masing-masing indikator tersebut akan disajikan dalam masing-masing tabel frekuensi berikut:

Berdasarkan hasil dari responden tabel dapat diketahui bahwa jawaban terkait bentuk partisipasi Organisasi dari beberapa indikator menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi politik berbentuk kegiatan organisasi sedang. DPW PAN Jatim mempunyai agenda yang terstruktur sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggotanya dalam mensukseskan kegiatan organisasi. Tetapi, tidak jarang juga ada kegiatan kondisional yang sebagian besar anggota perempuan berhalangan untuk mengikuti dikarenakan ijin.

Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Berdasarkan hasil responden dapat diketahui tingkat partisipasi anggota perempuan DPW Partai Amanat Nasional Jatim tingkatnya rendah. Hal ini disebabkan ruang yang didapatkan oleh anggota perempuan untuk menjalin relasi / hubungan dengan pejabat lain begitu sedikit, praktis hanya anggota yang mempunyai jabatan tinggi yang mempunyai jaringan ke pejabat pemerintah.

Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan

pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, kebutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan. Berdasarkan hasil responden dapat diketahui tingkat partisipasi violence adalah sedang.

Hambatan partisipasi politik anggota perempuan di DPW Partai Amanat Nasional Jawa Timur Perempuan merupakan salah satu aktor dalam dunia politik, namun seringkali perempuan tidak dapat berpartisipasi secara penuh dikarenakan berbagai kendala. Kendala yang dihadapi perempuan umumnya berasal dari perempuan itu sendiri meskipun ada juga dari eksternal. Misalnya saja dalam pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif, seorang calon legislatif membutuhkan tiga modal utama yakni modal politik, modal social, dan modal ekonomi.

Pertama, modal politik. Modal politik mengacu pada adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi rakyat. Hal ini dapat disiasati dengan memperkuat eksistensi perempuan dimulai dari dalam partai sendiri. Dewan Perwakilan Wilayah PAN Jatim dihuni oleh banyak orang-orang yang berpendidikan, dengan menimbulkan kesadaran dari dalam partai sendiri diharapkan penguatan eksistensi perempuan di luar partai semakin baik.

Kedua, Kurangnya dukungan partai. Misalnya, terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan, terbatasnya akses untuk jaringan politik, dan meratanya standar ganda. Terkait dengan hal tersebut, meskipun partai-partai politik memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan kampanye, tetapi perempuan tidak memperoleh keuntungan dari sumber yang ada tersebut. Sebagai contoh, partai-partai tidak memberikan dukungan dana yang memadai untuk kandidat perempuan

Ketiga, kurangnya hubungan dan kerja sama dengan organisasi public lainnya, seperti serikat dagang (buruh) dan kelompok-kelompok perempuan. Para serikat buruh dan kelompok-kelompok perempuan di Indonesia, masih menjaga jarak dengan anggota parlemen, atau tidak memperkuat hubungan-hubungan yang terorganisir dalam bentuk komunikasi dan lobi mengenai berbagai isu yang terkait untuk meningkatkan perempuan pada tingkat pembuatan keputusan.

Selanjutnya modal sosial, modal sosial adalah yang berkaitan dengan bangunan relasi-relasi dan kepercayaan yang dimiliki oleh caleg dengan masyarakat yang dimilikinya. Terkait dengan adanya ketentuan mayoritas suara terbanyak, maka caleg perempuan dituntut untuk memiliki popularitas di dapilnya.

Ketiga, modal ekonomi. Secara jelas, modal ekonomi mengacu pada dana yang harus dimiliki dan/atau dikeluarkan oleh seorang caleg untuk biaya kampanye.

Selain persoalan ketidakmampuan perempuan dalam kepemilikan ketiga modal tersebut, caleg perempuan juga memiliki kendala ideologis dan psikologis (Karam,1999). Adapun kendala ideologis dan psikologis yang akan dihadapi ketika akan masuk parlemen, adalah pertama, masih adanya ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada perempuan dan laki-laki. System nilai patriarki, kaku, dan tradisional menampilkan peran-peran yang tersegregasi secara seksual, dan ini disebut sebagai nilai cultural tradisional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Partisipasi politik perempuan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur sangat rendah. Secara rinci, simpulan tersebut dinyatakan pada hasil dan penjelasan berikut ini : 1. Berdasarkan pada hasil jumlah seluruh skor alternatif jawaban pada partisipasi politik perempuan menunjukkan perolehan skor sebesar 2580. Skor tersebut terletak dalam kelas interval ≤ 5458 sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam suatu tahap perencanaan kegiatan atau program kerja tersebut berada pada kategori **rendah**. 2. Rendahnya partisipasi politik perempuan pada tahap ini yaitu dikarenakan adanya perbedaan asumsi di Dewan Perwakilan Wilayah jika dilihat dari gender (jenis kelamin). Sebagian besar anggota yang berpartisipasi pada tahap perencanaan kegiatan tersebut adalah laki-laki. Hal tersebut disebabkan adanya sistem pelapisan social yang terbentuk dalam Dewan Perwakilan Wilayah, yang membedakan kedudukan dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Perempuan menganggap bahwa seorang laki-laki memiliki tanggung jawab, kewajiban dan hak yang lebih tinggi untuk turun langsung mengikuti rapat perencanaan.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan, telah diketahui bahwa partisipasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa timur sangat rendah, oleh karena itu peneliti berharap kedepannya partisipasi perempuan dalam suatu partai politik dapat menyamai kalau bisa melebihi partisipasi politik laki-laki jika memang perempuan sudah mampu dan memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu, pengurus Dewan Perwakilan Wilayah juga harus sedikit lebih memperhatikan suara perempuan yang bisa dikatakan

sebagai suara minoritas. Suara perempuan juga memiliki peran besar jika lebih didengar karena umumnya dari mereka ketika mengutarakan sebuah pendapat selalu berasal dari hati. Ketika partisipasi politik perempuan ini meningkat, secara tidak langsung akan merubah atau menghapus paradigma yang telah terbangun dimasyarakat dimana perempuan hanya digunakan sebagai pelengkap, pemanis kuota keterwakilan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Fatwa.2003. *PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa*. Jakarta.
- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Terjemahan Susetiawan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Holil Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Nasution, S. 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Riduwan. 2007. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung : Alfabeta
- Riduwan.2007. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*.Bandung : Alfabeta
- Riduwan, Drs. 2009. *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*.Bandung : Alfabeta
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers
- Sastropetro, R.A. Santoso.1985. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabet